



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 OKTOBER 2015

AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
I	STRATEGI 1: PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA				
	Fokus: Optimalisasi Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah				
1.	Optimalisasi pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L)	Seluruh Kementerian Koordinator (Kemenko)	Seluruh K/L di bawah binaan Kemenko	Meningkatnya pelaksanaan Aksi HAM di K/L	Tersedianya laporan pelaksanaan Aksi HAM di seluruh K/L pelaksana di bawah binaan masing-masing Kementerian Koordinator (Kemenko)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
2.	Optimalisasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda)	Kementerian Dalam Negeri	Seluruh Pemda	Meningkatnya pelaksanaan Aksi HAM di Pemda	Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan aksi HAM di daerah
II	STRATEGI 2: PENYIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM DAN PENYUSUNAN BAHAN/LAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG TELAH DISAHKAN				
	Fokus: Optimalisasi Pemantauan Implementasi Instrumen Internasional HAM dan Tindak Lanjut Rekomendasi <i>Treaty Bodies</i> dalam rangka Penyiapan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM				
3.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas	1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ke Komite Hak Penyandang Disabilitas 2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ke semua pemangku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					kepentingan
4.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ke Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ke semua pemangku kepentingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
5.	Penyusunan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	Kementerian Luar Negeri	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi tentang implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya bahan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke Komite Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran2. Terlaksananya konsultasi bahan laporan implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Seluruh Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke semua pemangku kepentingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
III	STRATEGI 3: PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	Fokus: Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Instrumen Internasional HAM				
6.	Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dari perspektif HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian dan Lembaga pemrakarsa	Meningkatnya RUU, RPP, dan RPerpres yang berperspektif HAM dalam proses harmonisasi	Tersusunnya hasil telaahan RUU, RPP, dan RPerpres dari perspektif HAM
7.	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
8.	Pelaksanaan evaluasi Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	Kementerian Dalam Negeri	Pemda Provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang telah dievaluasi dari perspektif HAM
9.	Penyusunan pedoman perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)	Seluruh K/L dan Pemda	Penyusunan perencanaan dan penganggaran K/L dan Pemda yang berpihak pada penyandang disabilitas	Tersedianya pedoman perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas
10.	Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Kelanjutusiaan	Kementerian PPN/Bappenas	Seluruh K/L dan Pemda	Tersedianya panduan bagi K/L dalam menyusun program Kelanjutusiaan	Tersedianya dokumen Strategi Nasional Kelanjutusiaan
Fokus: Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang Belum Berperspektif HAM					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
11.	Pemantauan dan evaluasi Peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian dan lembaga pemrakarsa, Pamda	Tersedianya telaahan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM yang memuat rekomendasi kepada pemrakarsa	Tersedianya hasil evaluasi PP, Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditelaah dari perspektif HAM
12.	Pelaksanaan pembatalan Perda yang tidak berperspektif HAM	Kementerian Dalam Negeri	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya peraturan daerah yang berperspektif HAM	Rekapitulasi Perda yang berperspektif HAM yang dibatalkan
13.	<i>Review</i> Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk	Pemda Provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk	Tersedianya laporan yang memuat rekapitulasi produk hukum daerah yang <i>di-review</i> sesuai dengan parameter HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Hukum Daerah			Hukum Daerah	
IV	STRATEGI 4: PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HAM				
	Fokus: Peningkatan Pemahaman Aparatur dalam Penerapan Nilai-Nilai HAM termasuk Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya				
14.	Pendidikan HAM di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Meningkatnya pemahaman tentang HAM bagi aparatur pemerintah di lingkungan internal K/L dan Pemda	Terlaksananya pendidikan HAM di K/L dan Pemda
15.	Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif bagi petugas dan relawan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya petugas dan relawan terlatih dalam penanganan bencana yang inklusif	Terlaksananya pelatihan bagi petugas dan relawan dalam penanganan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas di pusat dan di daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Fokus: Penyebarluasan Nilai-Nilai HAM termasuk Hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Menyeluruh dan Terencana				
16.	Pelaksanaan diseminasi HAM bagi masyarakat	Kementerian Hukum dan HAM	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman tentang HAM di kalangan masyarakat	Terlaksananya 30 kegiatan diseminasi HAM bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama
17.	Pemberian pelatihan keterampilan hidup bagi siswa penyandang disabilitas tamatan pendidikan dasar dan menengah 3 tahun terakhir dan yang tidak bersekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya keterampilan hidup siswa penyandang disabilitas	Terlaksananya pelatihan keterampilan hidup bagi siswa penyandang disabilitas di pusat dan di daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
18.	Peningkatan kapasitas petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/ Organisasi Sosial dalam pemilihan dan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan kapasitas petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/ Organisasi Sosial dalam penggunaan alat bantu 2. Meningkatnya pemahaman petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial terkait dengan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas	1. Terlaksananya pelatihan bagi petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/ Organisasi Sosial dalam penggunaan alat bantu 2. Terlaksananya pelatihan terkait penggunaan alat bantu penyandang disabilitas kepada petugas Balai/Unit Pelaksana Teknis/Organisasi Sosial
19.	Penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlindungan konsumen	Kementerian Perdagangan	Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian	Meningkatnya perlindungan kepada konsumen	Terlaksananya diklat PPNS perlindungan konsumen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
			Kesehatan		
20.	Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dan petugas intansi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum dan petugas intansi dalam penanganan ABH	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak
21.	Pelatihan bagi pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak,	Meningkatnya jumlah pengelola P2TP2A yang mampu memberikan layanan pemberdayaan perempuan, informasi, dan layanan perempuan	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola P2TP2A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
V	STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM				
	1. Hak Hidup				
	Fokus: Peningkatan Kualitas Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Rentan Lainnya				
22.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil	Kementerian Kesehatan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	Terlaksananya pemberian layanan kesehatan bagi ibu hamil
23.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita	Kementerian Kesehatan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi bayi	Persentase anak usia 0-11 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap
24.	Peningkatan layanan kesehatan yang layak dan penyediaan obat bagi penderita HIV/ AIDS (termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan)	Kementerian Kesehatan	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika	Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS yang diobati	Terlaksananya penanganan kasus HIV/AIDS yang diobati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
25.	Penemuan, Pembebasan, dan Pengobatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung	Kementerian Kesehatan	Kementerian Sosial Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ODGJ dipasung yang ditemukan, dibebaskan serta mendapat pelayanan kesehatan jiwa, baik melalui kelembagaan dan di luar kelembagaan	1. Terlaksananya kegiatan penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ dipasung 2. Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas di kabupaten/ kota
26.	Peningkatan pelayanan kelanjutusiaan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri	Terpenuhinya pelayanan dasar kelanjutusiaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan dasar kelanjutusiaan
Fokus: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
27.	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Menurunnya beban pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri	Terlaksananya kegiatan pemantauan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh industri
28.	Peningkatan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat setempat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang mengikutsertakan masyarakat setempat
29.	Peningkatan pelestarian kawasan berfungsi lindung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kawasan berfungsi lindung yang dilestarikan	Terlaksananya kegiatan pelestarian kawasan berfungsi lindung
	2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan				
	3. Hak Mengembangkan Diri				
	Fokus: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memperoleh Pendidikan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
30.	Pemberian kesempatan belajar bagi warga masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar dan menengah baik formal dan nonformal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun nonformal	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah bagi anak usia sekolah2. Terlaksananya kegiatan pendidikan dasar dan menengah bagi warga masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
31.	Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas yang berprestasi internasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pelaku olahraga disabilitas yang memperoleh penghargaan	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas
32.	Pemberian pelatihan bahasa isyarat di televisi dalam program berita	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Pemda Provinsi	Penyelenggaraan pelatihan bahasa isyarat untuk petugas televisi	Terlaksananya pelatihan bahasa isyarat untuk petugas televisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
33.	Penayangan bahasa isyarat di televisi dan program berita	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial	Terdapat stasiun televisi yang menayangkan berita dengan bahasa isyarat	1. Terlaksananya penayangan bahasa isyarat di stasiun televisi nasional 2. Terlaksananya penayangan bahasa isyarat di stasiun televisi di setiap provinsi
34.	Pelatihan kepada instruktur olahraga untuk penyandang disabilitas	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Meningkatnya keterampilan dan pemahaman instruktur olahraga untuk penyandang disabilitas	Tersedianya instruktur olahraga yang mendapat pelatihan
35.	Fasilitasi penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) 2016 bagi olahragawan penyandang disabilitas	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Persiapan penyelenggaraan PEPARNAS 2016	Tersedianya laporan persiapan penyelenggaraan PEPARNAS 2016



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
36.	Fasilitasi penyelenggaraan olahragawan disabilitas dalam kegiatan ASEAN Paragames 2015 di Singapura	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Sosial	Meningkatnya olahragawan penyandang disabilitas yang turut serta dalam ASEAN Paragames 2015 di Singapura	Terfasilitasinya olahragawan penyandang disabilitas yang diikutsertakan dalam ASEAN Paragames 2015 di Singapura
37.	Identifikasi sarana Layanan Informasi Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terkumpulnya data tentang sarana Layanan dan Informasi Ketenagakerjaan Penyandang disabilitas di provinsi dan kabupaten/ kota	Tersedianya sarana layanan dan informasi ketenagakerjaan penyandang disabilitas di setiap provinsi dan kabupaten/kota
38.	Pelatihan tutor pendamping siswa penyandang disabilitas pada Sekolah Terbuka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,	Meningkatnya keterampilan dan pemahaman tutor terlatih untuk menangani siswa ABK	Terlaksananya pelatihan tutor untuk menangani siswa ABK di Sekolah Terbuka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
39.	Peningkatan penerimaan ABK di daerah 3T agar dapat bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka dalam wilayah Indonesia	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya siswa ABK di daerah 3T yang bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka	Terlaksananya pendidikan bagi siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusi terdekat atau sekolah terbuka di setiap kabupaten/kota di daerah 3T
40.	Pengidentifikasian sekolah yang memiliki fasilitas pendukung bagi siswa penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan, milik pemerintah maupun	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,	Tersedianya data sekolah yang memiliki fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan	Tersusunnya rekapitulasi sekolah yang memiliki fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di setiap jenjang dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	swasta		dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Fokus: Peningkatan Aksesibilitas Informasi dan Teknologi bagi Masyarakat Termasuk Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya					
41.	Penyediaan sarana informasi yang diperlukan publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah dan fasilitas sarana penyedia informasi yang diperlukan publik	Tersedianya titik akses internet
42.	Penyusunan kebijakan pembuatan situs pemerintah yang mudah diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Sosial	Adanya pembahasan mengenai kebijakan yang mendorong penyediaan situs pemerintah yang mudah diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara	Terselenggaranya kegiatan yang membahas tentang kebijakan yang mendorong penyediaan situs pemerintah yang mudah diakses penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara
4. Hak Memperoleh Keadilan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
Fokus: Peningkatan Penyelesaian Kasus Pidana Ringan melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i>					
43.	Peningkatan perluasan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius (ringan) di tingkat penyidikan	Kepolisian Negara RI	Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pidana yang tidak serius (ringan) di tingkat penyidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya <i>focus group discussion</i> tentang peraturan perundang-undangan terkait keadilan restoratif tentang kasus tindak pidana ringan (menghasilkan rekomendasi)2. terselesaikannya kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di tingkat penyidikan
Fokus: Peningkatan Penyediaan Bantuan Hukum dan Pendampingan bagi Masyarakat dari Kelompok Rentan					
44.	Penguatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)	Kementerian Hukum dan HAM	Pemdan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum bagi	Terlaksananya penyuluhan tentang penguatan bantuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin			masyarakat miskin	hukum bagi OBH
45.	Penguatan peran Pemda dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya peran Pemda dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none">1. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong peran Pemda untuk mengalokasikan anggaran terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin2. Terlaksananya pengalokasian rencana anggaran terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pemda
46.	Penyediaan pendamping, pengampu (wali), dan ahli dalam proses hukum	Kepolisian Negara RI	Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemda	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya jumlah pendamping, pengampu (wali), dan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya pendamping, pengampu (wali), dan ahli di kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia		Provinsi dan Kabupaten/Kota	ahli dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di kantor polisi 2. Meningkatnya pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	polisi dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di setiap provinsi 2. Tersedianya pendampingan dan pengampunan dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi					
Fokus: Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama					
47.	Peningkatan pembinaan dan pengembangan Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Kementerian Agama	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan KUB	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Hukum dan HAM, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
6. Hak Atas Rasa Aman					
Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Penyiksaan dalam Proses Penegakan Hukum					
48.	Pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum	Kepolisian Negara RI	Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM RI	Terlaksananya proses penegakan hukum tanpa kekerasan	Terbitnya peraturan terkait dengan pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum
Fokus: Percepatan Penyelesaian Konflik Berbasis Masyarakat					
49.	Pengendalian dan pengamanan demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat)	Kepolisian Negara RI	Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,	Menurunnya tindak anarkis dalam demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat)	Terlaksananya penanganan tindak rusuh dalam demonstrasi dan perkelahian massal (antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	yang anarkis		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
50.	Percepatan penyelesaian konflik pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa pertanahan	Terlaksananya penanganan sengketa tanah
51.	Percepatan penyelesaian konflik lahan hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian	Berkurangnya konflik lahan/hutan	1. Tercapainya Penetapan pengukuhan kawasan hutan 2. terselesaikannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		konflik lahan
52.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif penyandang disabilitas	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian Sosial, Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan <i>Search and Rescue</i> Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedia peraturan/ pedoman manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif	Terbitnya peraturan/ pedoman manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif
7. Hak Atas Kesejahteraan					
Fokus: Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Diperlukan untuk Mendukung Standar Hidup yang Layak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
53.	Peningkatan penyediaan air bersih	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan air bersih	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah2. Terlaksananya pelayanan melalui SPAM di desa3. Terlaksananya pemberian fasilitas air bersih di Daerah Kawasan Khusus (3T dan Daerah Pemekaran baru)
54.	Peningkatan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Sosial Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya bantuan pembangunan dan perolehan rumah layak huni bagi masyarakat	Terlaksananya pemberian rumah layak huni bagi MBR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	rumah layak huni			berpenghasilan rendah (MBR)	
55.	Peningkatan pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya	Terlaksananya pembangunan fasilitas pemanfaatan sumber daya ikan bagi nelayan dan masyarakat lainnya
56.	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha sumber daya ikan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada nelayan dan masyarakat setempat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya tanggung jawab sosial pelaku usaha sumber daya ikan kepada nelayan dan masyarakat setempat	Terlaksananya rekapitulasi data pelaku usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya
57.	Peningkatan akses layanan listrik bagi nelayan dan masyarakat tidak mampu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses layanan listrik bagi nelayan dan masyarakat tidak mampu	Terlaksananya penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan masyarakat tidak mampu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
58.	Pembangunan dan Peningkatan prasarana dan sarana transportasi di daerah	Kementerian Perhubungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana dan sarana transportasi di daerah	1. Terbangunnya Fasilitas Integrasi antar Moda di lokasi 2. Terbangunnya <i>Bus Rapid Transit</i> di lokasi
59.	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi udara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Kementerian Perhubungan	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	1. Tersedianya area parkir khusus bagi penyandang disabilitas di bandara 2. Tersedianya jalur khusus untuk <i>check in</i> dan desain <i>counter check in</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas di bandara
Fokus: Peningkatan Penyediaan Lapangan Pekerjaan dan Jaminan Sosial Termasuk bagi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Rentan Lainnya					
60.	Pemantauan dan evaluasi terhadap	Kementerian	Kementerian Sosial, Kementerian	Meningkatnya kesempatan kerja bagi	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan swasta	Ketenagakerjaan	Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	penyandang disabilitas di sektor swasta	yang memuat: 1. Data tentang perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas 2. Rekomendasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi
61.	Meningkatkan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri melalui program <i>Government to Government</i> (G to G) dan <i>Government to Private</i> (G to P)	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri	Meningkatnya penempatan dan perlindungan TKI melalui Program G to G dan G to P	Terlaksananya penempatan dan perlindungan TKI melalui program G to G dan G to P
62.	Pemberdayaan ekonomi	Badan Nasional	Kementerian Koperasi	Meningkatnya TKI purna	Terlaksananya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	TKI purna dan keluarganya	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Ekonomi Kreatif, Pemda Kabupaten/Kota, Unit Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Keuangan	dan keluarga yang diberdayakan di bidang ekonomi produktif dan yang memiliki usaha produktif	pemberdayaan usaha ekonomi produktif kepada TKI Purna/Warga Negara Indonesia <i>overstay</i> /TKI bermasalah dan keluarganya
63.	Pelibatan penyandang disabilitas dalam pelatihan kewirausahaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di pusat dan daerah yang mengikutsertakan penyandang disabilitas	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan di pusat dan daerah yang mengikutsertakan penyandang disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
64.	Peningkatan bantuan modal usaha bagi individu dan atau kelompok usaha penyandang disabilitas	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota,	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya alokasi dana bantuan modal usaha individu dan atau kelompok usaha penyandang disabilitas2. Meningkatnya individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan modal usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya alokasi dana bantuan modal usaha individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas2. Terlaksananya pemberian bantuan modal usaha bagi individu dan/atau kelompok usaha penyandang disabilitas
65.	Pengidentifikasi penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Pemda Provinsi dan	Teridentifikasinya data penerima PBI	Terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan PBI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota		
66.	Pembuatan kebijakan yang memberi kemudahan akses kredit dan modal dalam usaha kecil dan menengah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya kebijakan mengenai alokasi kredit usaha bagi Unit Usaha Kecil dan Menengah yang dikelola pengusaha penyandang disabilitas di lembaga keuangan2. Meningkatnya bantuan modal usaha bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas di K/L dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program <i>Corporate Social Responsibilities</i> (CSR)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya alokasi kredit usaha bagi Unit Usaha Kecil dan Menengah yang dikelola pengusaha penyandang disabilitas di lembaga keuangan2. Tersedianya bantuan modal usaha bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas di K/L dan SKPD dan terlaksananya CSR yang dialokasikan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas3. Tersedianya layanan usaha dan perbankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
				yang dialokasikan bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota 3. Meningkatnya layanan usaha dan perbankan yang inklusif bagi penyandang disabilitas	yang inklusif bagi penyandang disabilitas
67.	Pengawasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di daerah	Kementerian Sosial	Kementerian Dalam Negeri Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya NSPK layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Tersedianya NSPK layanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
68.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Kementerian Pertanian	Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan	Meningkatnya desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan	Terlaksananya kegiatan P2KP yang berbasis KRPL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	di desa
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan					
Fokus: Peningkatan Akses dan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam rangka Turut serta dalam Pemerintahan					
69.	Pemberian identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penduduk rentan administrasi kependudukan yang memperoleh identitas	Terlaksananya pemberian identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
Fokus: Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Pemerintahan					
70.	Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala	Komisi Pemilihan Umum	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Komisi	Tersedia TPS Pemilukada beserta kelengkapan surat suara yang mudah	Pemberian kelengkapan surat suara yang mudah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	Daerah (Pemilukada) yang mudah diakses penyandang disabilitas		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	diakses penyandang disabilitas	diakses penyandang disabilitas di TPS
9. Hak Perempuan					
Fokus: Pengarusutamaan Gender					
71.	Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian, Lembaga, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya kebijakan di berbagai bidang pembangunan yang responsif gender2. Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan3. Meningkatnya pemahaman pemangku	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan2. Tersedianya profil gender di bidang pembangunan di K/L dan di provinsi3. Tersedianya sumber daya manusia terlatih tentang PUG di K/L, provinsi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG di berbagai bidang pembangunan 4. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L, satuan kerja perangkat daerah, pusat-daerah, serta antar pemerintah-masyarakat termasuk organisasi non	kabupaten/kota, dan organisasi kemasyarakatan 4. Terlaksananya kebijakan PUG di K/L dan provinsi 5. Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG 6. Tersedianya forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di K/L dan provinsi 7. Terwujudnya kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG	Perlindungan Anak dengan K/L, satuan kerja perangkat daerah, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan yang responsif gender
72.	Upaya mendorong penyediaan pembangunan Tempat Penitipan Anak (TPA) di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah TPA di Kementerian, Lembaga, dan Pemda	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja kepada kementerian, lembaga, dan Pemda yang telah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					membangun TPA
Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Berbagai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang					
73.	Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, Lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan2. Tersedianya data dan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak3. Tersusunnya pedoman pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan standar pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di berbagai sektor2. Tersusunnya laporan dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang mempunyai laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak3. Terbentuknya P2TP2A di provinsi dan kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	4. Tersedianya pedoman layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 5. Tersusunnya <i>review</i> standar pendanaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 6. Tersedianya pedoman pencegahan kekerasan berbasis gender dan pelibatan laki-laki 7. Meningkatnya koordinasi dan integrasi serta sinkronisasi yang sinergi antar	4. Terlaksanannya layanan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 5. Tersedianya laporan dari Kementerian Lembaga dan Pemda yang melakukan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pendanaan 6. Meningkatnya Pemda yang melaksanakan kegiatan berbasis pedoman pencegahan kekerasan berbasis gender dan pelibatan laki-laki di Pemda 7. Terbentuknya kesepakatan bersama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
				Kementerian Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pusat dan Daerah, serta antar Pemerintah dan Masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan K/L dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pusat dan Daerah, serta antar Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
74.	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan	1. Tersedianya kebijakan teknis pencegahan dan penanganan TPPO	1. Terbitnya kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO yang disusun, direview,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga	2. Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO di kalangan masyarakat atau komunitas	dikoreksi, dan diharmonisasikan 2. Terlaksananya kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat dan atau lembaga berbasis masyarakat atau komunitas yang paham pencegahan dan penanganan TPPO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			Kerja Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota		
75.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pengaduan di UPPA	Kepolisian Negara RI	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pengaduan dalam UPPA	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai UPPA
76.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Pemberdayaan	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan	Tersedianya bantuan hukum bagi perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan		Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, dan	bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan	korban kekerasan
77.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Kementerian Sosial	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
78.	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO	Kementerian Sosial	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO	Tersedianya layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
79.	Pengidentifikasi penanganan korban kekerasan terhadap	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung Kementerian Hukum	Tersedianya data penanganan korban kekerasan terhadap	Rekapitulasi data penanganan korban kekerasan terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	perempuan	Perlindungan Anak,	dan HAM, Badan Nasional Penganggulangan Bencana, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	perempuan	perempuan
	10. Hak Anak				
	Fokus: Peningkatan Akses terhadap Pelayanan dan Pemenuhan Hak Dasar bagi Anak				
80.	Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif penyandang disabilitas	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Sosial	Meningkatnya PAUD inklusif bagi anak penyandang disabilitas	Tersedianya PAUD inklusif bagi anak penyandang disabilitas di setiap provinsi
	Fokus: Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum				
81.	Peningkatan pembangunan sarana	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Tata Ruang dan Agraria,	Meningkatnya jumlah BAPAS/Pos BAPAS,	Pembangunan BAPAS/Pos BAPAS, LPAS, LPKA yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
	dan prasarana penunjang SPPA (Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	LPAS, LPKA yang dibangun	dibangun di provinsi
82.	Pembangunan dan Pengembangan LPKS ABH	Kementerian Sosial	Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah LPKS ABH yang dibangun dan dikembangkan	Pembangunan dan pengembangan LPKS ABH dibangun di provinsi
83.	Identifikasi ketersediaan ruang penanganan anak	Kepolisian Negara RI	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatnya jumlah ruang penanganan anak	Tersedianya ruang penanganan anak di Kepolisian Daerah atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	di tingkat penyidikan		Perlindungan Anak		Kepolisian Resort
84.	Identifikasi ketersediaan ruang penanganan anak di tingkat pengadilan	Mahkamah Agung	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jumlah ruang penanganan anak	Tersedianya ruang penanganan anak di Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri
85.	Peningkatan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	Kementerian Sosial	Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi NAPZA bagi anak di provinsi2. Tersedianya tenaga medis rehabilitasi NAPZA di provinsi3. Tersedianya pusat rehabilitasi NAPZA di provinsi4. Terlaksananya jenis program rehabilitasi NAPZA bagi anak di provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
86.	Pencegahan berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran sekolah dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none">1. Penyisipan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah di provinsi2. Terlaksananya kegiatan integrasi pencegahan di sekolah di provinsi
VI	Pelayanan Komunikasi Masyarakat				
	Fokus: Peningkatan Penanganan Permasalahan HAM yang Ditindaklanjuti oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemda				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
87.	Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM termasuk hak penyandang disabilitas	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian, Lembaga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM2. Tersedianya sistem yang memberikan informasi tentang perkembangan/ proses	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya rancangan sistem komunikasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh K/L, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota2. Terselenggaranya komunikasi masyarakat oleh instansi yang berwenang
88.	Peningkatan pelayanan atas informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM di provinsi, kabupaten/kota	Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Terbentuknya unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan HAM2. Terlaksananya kegiatan tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Fadlansyah Lubis